

**PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE*  
*GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PERBANKAN**

**(Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  
(BEI) Tahun 2010-2012)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Reguler II Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ALINA ADDIYAH**  
**NIM. C2C607012**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama penyusun : Alina Addiyah  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607012  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : *PENGARUH PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012).*  
Dosen pembimbing : Anis Chariri, SE. M.Com. PH.D. Akt

Semarang, 09 Agustus 2014

Dosen Pembimbing

(Anis Chariri, S.E., M.Com. Ph.D. Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama penyusun : Alina Addiyah  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607012  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Usulan Penelitian Skripsi : PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Agustus 2014

### Tim Penguji

1. Anis Chariri, SE., M.Com. Ph.D. Akt (.....)
2. Drs. Agustinus Santosa Adiwibowo, M. Si., Akt (.....)
3. Agung Juliarto, SE., M.Si., Akt., Ph.D (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Alina Addiyah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti saya menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 09 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Alina Addiyah)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Janganlah hanya mencoba untuk menjadi manusia sukses, tetapi jadilah manusia yang memiliki otak yang bernilai”.

‘’Albert Einstein’’

### **PERSEMBAHAN**

Untuk Ibu dan Bapak tercinta

Kakak dan Adikku Tersayang

Kekasihku

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effects of corporate governance mechanism on the financial performance of banking. Financial performance is calculated by using CFROA, meanwhile the corporate governance mechanism determined by variable board of commissioners, board of directors, and firm size.*

*The sample in this study were banking companies listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in a periode 2010-2012. The number of sample used were 23 companies listed were taken by purposive sampling. The method of analysis of this research used multi regression.*

*The result of this research showed that board of commissioners had negative and significant influence to financial performance; board of directors had positive and significant influence to financial performance; and firm size had negative and significant influence financial performance.*

**Keywords:** *Corporate Governance, board of commissioners, board of directors, firm size.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan. Kinerja keuangan dihitung dengan menggunakan CFROA, sedangkan mekanisme *corporate governance* ditentukan oleh variabel dewan komisaris, dewan direksi dan ukuran perusahaan.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dalam periode 2010-2012. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 23 perusahaan yang diambil melalui purposive sampling. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : *Corporate governance*, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.si., Akt, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Anis Chariri, S.E. M.Com. Ph.D. Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak saran, bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.



4. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si, Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan saran, arahan serta dukungan selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmunya sehingga berguna bagi penulis.
6. Kedua orang tua tercinta (Bapak Mukhlas dan Ibu Sri Hartini) yang telah tulus dalam mengasuh, merawat, membesarkan, membimbing serta mendo'akan penulis dalam setiap langkah.
7. Kakak saya Rokhmatul Laili dan adik saya Muhammad dzulfikar yang telah mendukung dan menjadi penyemangat penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Kekasihku yang saya sayangi, selalu menjadi inspirasi dan memberikan semangat dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
9. Sahabat-sahabatku tersayang : Ganesh, Satiti, Lita, Kiki, Prihandini ayu, Marissa, Mbak Dita, dan Dyah Ayu yang selalu ada di setiap suka maupun duka, bercerita dan berbagi canda, tawa maupun luka dan telah mengajarkan arti sebuah persahabatan.
10. Seluruh teman-teman Akuntansi angkatan 2007 Reguler II, Khususnya kelas B. terima kasih untuk persahabatan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi kita.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 09 September 2014

Alina Addiyah

C2C607012

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang masalah .....	1
1.2 Rumuan masalah .....	13
1.3 Tujuan penelitian .....	14
1.4 Manfaat penelitian .....	14
1.5 Sistematika penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 landasan teori .....	17
2.1.1 teori keagenan .....	17

2.1.2 pengertian dan konsep dasar <i>corporate governance</i> .....	21
2.1.2.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	21
2.1.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	24
2.1.2.3 Struktur <i>Corporate Governance</i> .....	27
2.1.2.4 Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	35
2.1.2.5 Implementasi <i>Corporate Governance</i> .....	36
2.1.2.6 Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> Dalam Industri Perbankan .....	38
2.1.2.7 Mekanisme <i>Corporate Governance</i> .....	39
2.1.2.7.1 Dewan Komisaris .....	40
2.1.2.7.2 Dewan Direksi .....	43
2.1.3 Ukuran Perusahaan .....	44
2.1.4 Kinerja Keuangan Perbankan .....	45
2.2 Penelitian Terdahulu .....	49
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis, Perumusan Masalah Dan Hipotesis .....	54
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan .....	54
2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan .....	55
2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan .....	57

### BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional .....	59
3.1.1 Variabel Dependen .....	59
3.1.2 Variabel Independen .....	60
3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris .....	60

3.1.2.2 Ukuran Dewan Direksi .....	60
3.1.2.3 Ukuran Perusahaan .....	61
3.2 Populasi Dan Sampel .....	62
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	63
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	63
3.5 Metode Analisis Data .....	63
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	64
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	65
3.5.3 Uji Goodness Of Fit .....	67
3.5.3.1 Uji Signifikan Simultan (Ujif) .....	67
3.5.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T) .....	69
3.5.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	69

#### BAB IV HASIL DAN ANALISIS

4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	71
4.2 Analisis Data .....	73
4.2.1 Analisis Statistic Deskriptif .....	73
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	74
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas .....	74
4.2.2.2 Uji Autokorelasi .....	75
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	76
4.2.2.4 Uji Normalitas .....	77
4.3 Hasil Uji Hipotesis .....	80
4.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F Test) .....	80

4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (T Test) .....	80
4.3.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	84
4.4 Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	88
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	89
5.3 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	52
Tabel 3.2 Identifikasi Dan Definisi Operasional Variabel .....	61
Tabel 4.1 Sampel Penelitian .....	71
Tabel 4.2 Data Perusahaan Sampel .....	72
Tabel 4.3 Hasil Statistik Deskriptif .....	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas .....	75
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson .....	76
Tabel 4.6 Hasil Uji Kolmogorof-Smirnov .....	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Perhitungan Pengujian Parameter Individual (T Test) .....	81
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi .....	84

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur <i>Corporate Governance</i> .....	28
Gambar 2.2 The Anglo-American System Atau Single-Board System .....	31
Gambar 2.3 Continental Europe System Atau Dual Board System .....	32
Gambar 2.4 Dual-Board System Yang Berlaku Di Indonesia .....	33
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	58
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Dengan Scatterplot .....	78
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Dengan Histogram .....	80
Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas Dengan Normal Probability Plot .....	81



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Data Sampel Perusahaan Perbankan

Lampiran B Data Variabel Independen

Lampiran C Data Variabel Dependen

Lampiran D Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran E Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran F Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran G Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran H Hasil Uji Normalitas

Lampiran I Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Lampiran J Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Lampiran K Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

*Corporate Governance* telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun belakangan ini. Masalah *corporate governance* semakin mendapat perhatian besar di Asia sejak terjadinya krisis finansial di berbagai Negara di tahun 1997-1998 yang diawali krisis di Thailand (1997), Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Hongkong dan Singapura yang akhirnya berubah menjadi krisis finansial Asia ini dipandang sebagai akibat lemahnya praktik *good corporate governance* (GCG) di Negara-negara Asia. Kajian mengenai *Corporate Governance* mulai meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron. Sebelum tahun 2002 Enron adalah perusahaan dengan pertumbuhan finansial yang pesat. Skandal ini mulai terungkap ketika pada awal 2002 perhitungan atas total *revenue* Enron di tahun 2000 yang sebelumnya

berjumlah 100,8 milyar USD menjadi hanya Sembilan milyar USD. Skandal finansial “megadolar” yang disebabkan adanya *misleading financial statement* membawa dampak yang luar biasa antara lain: Enron pailit, kurangnya kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron (Arifin, 2005). Beberapa kasus juga terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005) melibatkan pelaporan keuangan (*financial reporting*) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi. (Boediono, 2005).

Dengan melihat kasus tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *Corporate Governance* masih sangat lemah, karena praktik manipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan walaupun sudah menjauhi krisis yaitu tahun 1997-1998. Bukti menunjukkan lemahnya praktik *Corporate Governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi dalam pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan (Alijoyo *et al.*, 2004 ).

Penerapan dan pengelolaan *corporate governance* yang baik atau yang lebih dikenal dengan *good corporate governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang *good corporate governance* (*GCG*) bukan sebagai aksesoris belaka tetapi juga sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan (Tjager, 2003 dalam Darmawati 2004).

Penerapan *Corporate Governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu penerapan *Corporate Governance* di Indonesia sangat penting, karena prinsip *Corporate Governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia tidak tertindas dan dapat bersaing secara global.

Dengan adanya sistem *Corporate Governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh *return* atas investasinya, karena *Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. *Corporate Governance* juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di kantor korporat. Dalam hal ini *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. (FCGI, 2003).

Dengan melihat keadaan tersebut sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang aktifitas penerapan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan tata pengelolaan perusahaan yang menguraikan hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan

kinerja perusahaan melalui *supervise* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi terciptanya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak.

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Mengingat bahwa akhir-akhir ini *Corporate Governance* merupakan salah satu topik pembahasan sehubungan dengan gencarnya publikasi tentang kecurangan (*fraud*) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan (*adequacy*) *corporate governance*. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu suatu hal yang wajar dan penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk mengupayakan, mengurangi bahkan menghilangkan krisis

kepercayaan (*credibility gap*) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan tersebut.

Institusi keuangan perbankan memiliki sifat usaha spesifik (*neture of the firm*) yang membedakannya dari istitusi non-keuangan (Macey dan O'Hara, 2003 dalam Supriyatno 2006). Sifat usaha spesifik tersebut mendorong topik penelitian dalam industri perbankan dewasa ini mengarah pada masalah *corporate governance*. Terlebih lagi setelah beberapa Negara Asia terkena krisis finansial. (Arum dan Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006). Banyak ahli yang berpendapat bahwa kelemahan didalam penerapan *corporate governance* merupakan salah satu sumber kerawanan ekonomi yang menyebabkan memburuknya perekonomian Negara-negara tersebut pada tahun 1997 dan 1998 (Husnan, 2001). *Corporate governance* pada industri perbankan di Negara berkembang seperti halnya Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank meduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi. Khususnya sebagai mesin ekonomi (King dan Levine, 1993 dalam Sam'ani, 2008). Kedua, di Negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan operasi bank. (Arum, Turner, 2003 dalam Supriyatno 2006).

Menurut pendapat Caprio dan Levine (2002), sebagaimana telah dikutip Sam'ani (2008), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *corporate*

*governance*. Pertama, bank merupakan sektor saham yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru akan menghambat mekanisme *corporate overnance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan pada hakikatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat hutang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wolfensohn, *Presiden of the World Bank, c.* (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sedangkan, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael Johnson, seorang professor dari Harvard, memandang bahwa manajemen sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan

sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Dengan demikian “*manager could not be trusted to do their job which of course is to maximize shareholder value*”.

Dalam teori keagenan (*agency theory*), dijelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan ini dapat menimbulkan konflik yang disebut *agency conflict*. Hal ini disebabkan pihak prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang saling bertentangan (Jensen dan Meckling, 1976). Konsep *corporate governance* timbul karena adanya keterbatasan dari teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto dkk, 2000).

Manajer perusahaan yang berperan sebagai agen dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas pemilik. Dengan informasi yang dimiliki manajer dapat bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara mengorbankan kepentingan pemilik, sehingga informasi yang disampaikan kepada pemilik tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. (Ujiantho dan Pramuka, (2007). Richardson (dalam Ujianto dan Pramuka, 2007) menerangkan bahwa kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*). Asimetri antar manajemen (*agent*) dan pemilik



(*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). (Richardson, 1998).

Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik. (Menurut Dechow dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006), manajemen sebagai pihak yang memberikan informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan dihargai berdasarkan laporan keuangan yang dibuatnya sendiri. Hal ini diprediksi dapat menimbulkan manipulasi laba yang sering diartikan sebagai manajemen laba.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat diselaraskan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd, *et al.* (1988) dalam Mudiastuti dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (*board of directors*). Dechow, *et al.* (1996) dan Beasley (1996) dalam Sam'ani (2008) menemukan hubungan yang signifikan antara para dewan komisaris dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi

dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. Nama besar, kemauan dan iktikad baik saja belum cukup untuk membangun dewan komisaris berkelas dunia, dibutuhkan struktur, sistem dan proses yang memadai. Dewan komisaris harus berperan aktif, independen dan konstruktif. (Alijoyo, *et al.* 2004).

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah *corporate governance*. Sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 isu mengenai *corporate governance* telah menjadi salah satu bahasan penting dan menarik (Suhardjanto dan Apreria, 2010).

Penelitian mengenai hubungan antara *corporate governance* dengan kinerja telah banyak dilakukan. Penelitian CLSA (*Credit Lyonnais Securities Asset*) tahun 2002 menemukan bahwa saham perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik menunjukkan kinerja yang bagus. Demikian juga survei yang dilakukan oleh Mc Kinsey (2001) menemukan investor bersedia memberi premium 10-12% kepada perusahaan yang menerapkan *corporate governance* secara konsisten (Isgiyarta dan Tristiarini 2005).

Berghe dan Ridder (1999) dalam penelitian sebelumnya, menghubungkan kinerja perusahaan dengan *good corporate governance* tidak mudah dilakukan. Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan, misalnya penelitian Daily dkk, (1998) dan hasil survey CBI, Deloitte dan Touche (1996) sebagaimana yang dikutip oleh Darmawati, dkk (2004). Demikian juga dengan Young (2003) yang menganalisis beberapa penelitian yang menghubungkan *corporate governance* dengan kinerja

perusahaan. Di lain pihak, berdasarkan beberapa hasil penelitian, Berghe dan Ridder menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai *poor performance* disebabkan oleh *poor governance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Gompers, dkk (2003) dalam Darmawati (2004) yang menemukan hubungan positif antara indeks *corporate governance* dengan kinerja perusahaan jangka panjang.

Menurut Kakabadse dkk, (2001) dalam Darmawati, (2004) perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) perspektif teoritis yang diterapkan 2) metodologi penelitian, 3) pengukuran kinerja, dan 4) perbedaan pandangan atas keterlibatan dewan dalam pengambilan keputusan. Walaupun penelitian-penelitian tentang hubungan *corporate governance* dengan kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang berbeda, namun semuanya menyatakan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kinerja perusahaan.

Hastuti (2005) juga melakukan penelitian tentang GCG dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan. Dengan menggunakan data perusahaan yang sahamnya termasuk LQ45 tahun 2001-2002, hasil penelitian menemukan bahwa ada pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Tobins'Q. Penelitian Kusumawati dan Riyanto (2005) yang menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BEJ tahun 2002 berhasil membuktikan penerapan GCG berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan yang ditunjukkan dengan *market to book value* pada kuartal I, namun tidak berpengaruh pada *market to book value* pada kuartal II. Sedangkan penelitian Isgiyarta dan

Tristiarini (2005) menemukan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* mempengaruhi *abnormal return* saham perusahaan.

Penelitian lain yang merumuskan tentang hubungan antara penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Che Hat, *et al.* (2008). Dalam penelitiannya tersebut, Che Hat, *et al.* (2008) menggunakan variabel *timelines* (ketepatanwaktuan) dan *disclosure* (pengungkapan) hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penerapan *good corporate governance* dengan *timelines* dan *disclosure*. Selain itu penelitian ini menemukan pula bahwa *timelines* dan *disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan *good corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Ukuran perusahaan juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi tolok ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain : total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total asset dimana mempengaruhi kinerja tapi tidak secara langsung (ferri dan jones, 1979) dalam Riyanto (2011). Selain hal tersebut ada penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa secara umum perusahaan yang mempunyai total asset yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang total asset rendah. Oleh karena itu perusahaan dengan total asset besar lebih mampu menghasilkan tingkat

keuntungan yang lebih tinggi (Arryayani, 2003). Dalam pengertian bahwa perusahaan yang memiliki peralatan modern, fasilitas bagus serta sarana memadai akan lebih tinggi kinerjanya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan kecil atau dengan kata lain mempunyai asset kecil. Sedangkan Herni, *et al.* (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak ada pengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan, dengan meningkatkan ukuran perusahaan tidak dapat secara langsung meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas tentang mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan, terlihat hasil yang cukup beragam. Akan tetapi, hasil yang beragam tersebut juga dipengaruhi perbedaan variabel yang digunakan oleh masing-masing peneliti untuk merefleksikan beragamnya indikator mekanisme *corporate governance* disebabkan luasnya definisi mekanisme *corporate governance* tersebut. Mengingat bahwa dalam penelitian sebelumnya belum ada batasan mengenai apa saja variabel yang termasuk struktur, sistem dan proses baik internal maupun eksternal. Maka penelitian ini berusaha untuk melakukan penelitian yang berfokus pada struktur internal perusahaan. Struktur internal perusahaan terdiri dari komposisi dewan direksi dan dewan komisaris. Penelitian ini ingin mengungkap apakah komposisi struktur internal perusahaan ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun, berbicara mengenai kinerja perusahaan yang dihitung dengan rasio keuangan, tidak akan dapat dipisahkan dari ukuran perusahaan yang dicerminkan dengan total aset yang dimiliki. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, memungkinkan kinerja keuangan yang terjadi dalam operasional

suatu perusahaan semakin besar pula. Keuntungan, kerugian dan biaya yang dapat ditekan mungkin saja berbeda dengan perusahaan dengan aset yang lebih kecil. Penelitian ini menguji variabel *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan *Cash Flow Return On Asset* (CFROA).

CFROA merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah dengan depresiasi dibagi dengan total aktiva. Alasan menggunakan CFROA sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan adalah karena dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan, arus kas (*cash flow*) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih baik untuk menjamin kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Arus kas menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono dan Christiawan, 2004).

## **1.2 Rumusan Masalah**

*Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya agar perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
2. Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan ?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui hubungan mekanisme *Corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan *Cash Flow Return On Assets* yang terbagi atas tiga (3) variabel, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.
2. Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi industri perbankan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

### 2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan.

### 3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia, Khususnya pengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bagian yang berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian, dan perumusan hipotesis yang merumuskan asumsi hipotesis dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

## BAB VI HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang isi pokok dari keseluruhan penelitian, yang mana menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Corporate Governance*. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999).

Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*). Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di perusahaan. Konflik kepentingan antar manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*) *agency cost* ini mencakup biaya pengawasan oleh

pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan. Termasuk biaya audit independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk "*bonding expenditures*" yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Selain *agency cost*. Konflik yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) juga dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Dan teori agensi juga menjelaskan tentang timbulnya manajemen laba yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan pasti seorang manajer dan seorang pemilik. Dan dalam hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab lebih banyak terhadap perusahaan tersebut. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik dengan adanya imbalan yang besar. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana dengan memegang tanggung jawab yang besar, maka akan mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk pribadinya sendiri.

Menurut Eisenhardt (1989) seperti dikutip Darmawati dkk. (2005) teori keagenan oleh beberapa asumsi yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-*

*interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. (Shleifet dan Vishny, 1997) dalam Daniri (2004). *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/*capital* yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal akan memicu terjadinya biaya yang disebut biaya keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Biaya monitoring (*monitoring cost*), pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
2. Biaya bonding (*bonding cost*), untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan principal, atau untuk meyakinkan

bahwa principal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan yang tepat.

3. Kerugian residual (*Residual Loss*), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

Teori keagenan juga mengatakan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan. Namun munculnya mekanisme pengawasan tersebut akan menimbulkan biaya yang disebut biaya keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). Menurut Madiastuty dan Machfoedz, 2003) perlakuan manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan ini dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan tersebut, yaitu dengan:

1. Memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*managerial ownership*) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer.
2. Kepemilikan saham oleh investor institusi. Moh'd et al. (1998) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, selain itu, investor institusional dianggap *sophiscated investor* yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajer (Bushee, 1996).

3. Melalui monitoring dewan direksi (*board of directors*). Beberapa penelitian empiris (Dechow et. Al., 1996; dan Beasley,1996) telah menunjukkan hubungan yang signifikan antara peran dewan direksi dengan pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan direksi mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitoring proses pelaporan keuangan.

*Corporate governance* sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharapkan memberikan kepercayaan terhadap manajemen dalam mengelola kekayaan pemilik (*investor*) sehingga dapat meminimalkan adanya konflik kepentingan dan biaya keagenan.

## **2.1.2 Pengertian dan Konsep Dasar *Corporate Governance***

### **2.1.2.1 Pengertian *Corporate Governance***

*Corporate Governance* menurut Komite Cadbury adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. *Cadbury Commite* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Surya dan Yustiavandana 2006, h.24).

*Corporate Governance* menurut Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

*Corporate Governance* menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) dalam Daniri (2004), *corporate governance* sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP 117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir

dari penerapan sistem ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya (Surya dan Yustiavandana 2006, h. 25).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengecekan dan pertimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan juga pengukuran kinerjanya.

Dari definisi tentang *Corporate Governance* diatas, maka dapat diketahui adanya aspek-aspek penting dari *Corporate Governance* yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah:

1. Adanya keseimbangan antara organ-organ perusahaan diantaranya yaitu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.



4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materiil dan relevan.

#### **2.1.2.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance***

Dalam Hardikasari (2011), secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri *stakeholder* terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari *Corporate Governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, adalah:

- *Fairness* (Keadilan)

Prinsip keadilan (*fairness*) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham

minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku *insider*. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

- *Transparancy* (Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

- *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

- *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

*Responsibility* (Responsbilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari

adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

- *Independensi* (independen)

Untuk melancarkan asas *Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen *Corporate Governance* dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan *Good Faith* (bertindak atas iktikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *Corporate Governance*, agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Pedoman *Corporate Governance* yang telah dibuat oleh komite nasional *Corporate Governance* hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan *Corporate Governance* secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan

sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

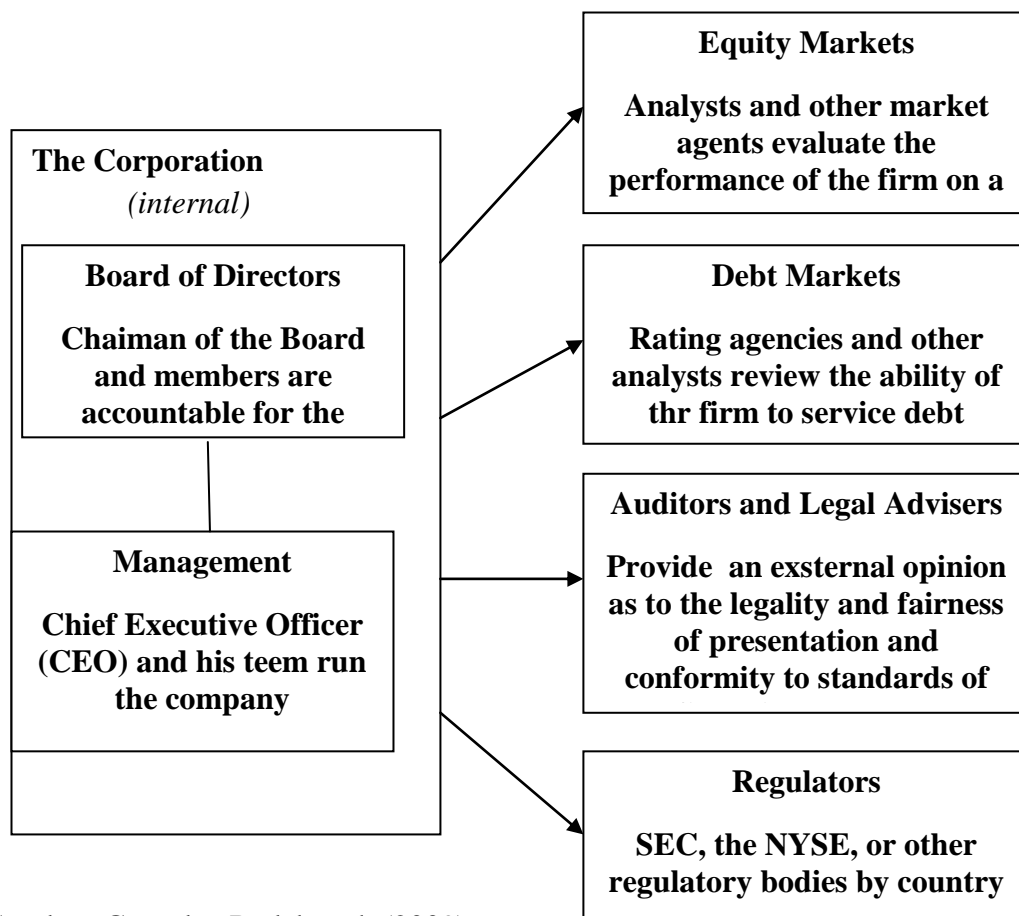
Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

### **2.1.2.3 Struktur *Corporate Governance***

Struktur didefinisikan sebagai suatu cara bagaimana aktifitas dalam suatu organisasi dibagi, dorganisir, dan dikoordiasi (Stoner et all dalam Arifin, 2005). Struktur merupakan suatu bentuk kerangka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada agar dapat digunakan, bekerja dan melaksanakan suatu fungsi. Struktur *Corporate Governance* merupakan bentuk penggambaran hubungan berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Gambaran dari struktur *Corporate Governance* berguna dalam menentukan arah strategis, kinerja sistematis, dan pengawasan kinerja perusahaan.

**Gambar 2.1**  
**Struktur *Corporate Governance***

*The Marketplace* (External)



Sumber: Gray dan Radebaugh (2009)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa struktur *Corporate Governance* terbentuk dari dua mekanisme berbeda yang membentuknya. Mekanisme ini merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol terhadap keputusan tersebut. Kedua mekanisme tersebut yaitu:

1. Struktur mekanisme pengendalian internal perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme internal ini adalah *agent* dan *principal* yang

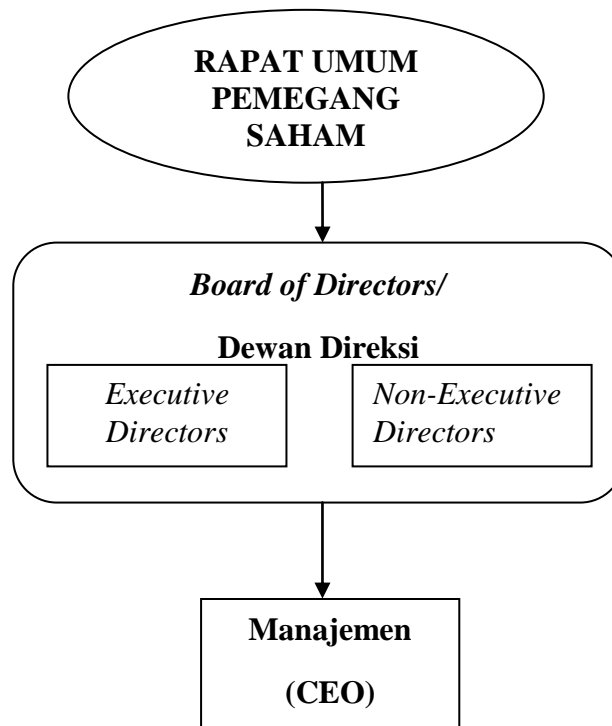
terdiri komposisi *board of directors* dan *ekscutive manager* di dalam perusahaan. *Board of Directors* atau dewan direksi memiliki kewenangan untuk mempekerjakan, memberhentikan, mengawasi, dan memberikan kompensasi kepada *top-level decision managers* atau para manajer puncak. Sementara manajemen adalah pihak eksekutif yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional perusahaan (manajer). Mekanisme pengendalian internal ini dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, *return*, maupun resiko yang disetujui oleh *principal* dan *agent*. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal misalnya adalah pemberian kontrak insentif jangka panjang (Arifin, 2005). kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan insentif pada manajer apabila kinerja perusahaan meningkat. Dengan demikian, terjadi hubungan yang mutual antara *principal* dan manajer. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang akan membuat modal *principal* berkembang, karena disisi lain hal tersebut juga akan meningkatkan kekayaan manajer sendiri.

2. Struktur mekanisme pengendalian *external*. Struktur mekanisme pengendalian *external* terdiri dari *stakeholder* yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan antara lain: pasar modal, pasar uang, auditor, paralegal dan regulator. Struktur mekanisme pengendalian eksternal merupakan mekanisme pengendalian pasar. Karena mekanisme ini terbentuk oleh hubungan perusahaan dengan pasar, sehingga

pengendalian perusahaan dilakukan oleh pasar sendiri. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan menurunnya nilai perusahaan. Pada saat terja di kondisi yang demikian, pasar akan merespon dengan mengambil kebijakan untuk melakukan perombakan struktur manajerial yang telah menjabat (Arifin, 2005).

Arifin (2005) menyebutkan secara umum terdapat 2 (dua) model struktur internal *Corporate Governance* di dunia, yaitu *The Anglo-American System* dan *The Continental Europe System*. Model *Anglo-Saxon* ini disebut dengan *Single-board system*, dimana struktur *governance* terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), serta *executive manager* yang dipimpin oleh CEO. *Single-board system* merupakan struktur *corporate governance* yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini, anggota dewan komisaris (*board of commissioners*) juga merangkap anggota direksi. Tidak ada pemisahan antara kedua dewan ini. Dalam struktur *Single-board*, kedua dewan ini sama-sama disebut sebagai *board of directors*. Perusahaan-perusahaan di Inggris, Amerika, Kanada serta Negara-negara lain umumnya berbasis *single-board system* yang dipengaruhi langsung oleh model *Anglo-Saxon*.

**Gambar 2.2**  
*The Anglo-American system atau Single-board System*

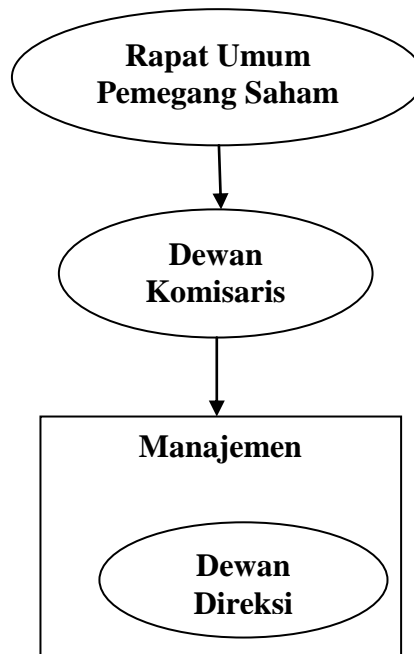


Sumber: Anyta (2011)

Model *Continental Europe*, struktur *Corporate Governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Manajer Eksekutif (manajemen). Struktur dari *Continental Europe* ini disebut *Two-board system*. Atau *Dual-board system*, yaitu struktur *Corporate Governance* yang dengan tegas memisahkan dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam hal ini, keanggotaan *board of commissioners* (dewan komisaris) sebagai dewan pengawas, dan *board of directors* (dewan direksi) atau manajemen sebagai eksekutif perusahaan. Model *Continental Europe* merupakan model yang digunakan di Jepang, Jerman, Prancis, Denmark dan Belanda.



**Gambar 2.3**  
*Continental Europe System atau Dual-board system*



Sumber :Tjager dkk (2003) dan Syakhroza (2005) dalam (Arifin (2005)

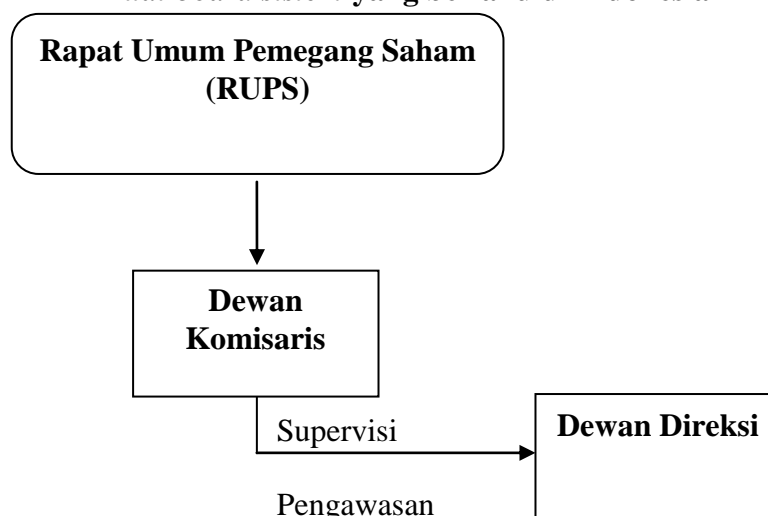
Dalam struktur model *two-board system*, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan. Posisi dewan komisaris dalam model ini relatif kuat terhadap direksi sehingga fungsi pengendalian/kontrol terhadap manajemen dapat berjalan dengan efektif.

Arifin (2005) menyatakan pada dasarnya struktur *Corporate Governance* diatur oleh undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya entitas. Di Indonesia

sendiri sistem hukumnya sangat kental dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, sehingga dalam struktur *Corporate Governance* yang dianut di Indonesia pun dipengaruhi oleh struktur yang berlaku di Belanda..

KNKG (2006) Menyatakan bahwa kepengurusan Perseroan Terbatas di Indonesia menganut *two-board system* dimana Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan (*fiduciary responsibility*). Namun penerapan *two-board system* dalam struktur *Corporate Governance* di Indonesia berbeda dengan model *Continental Europe*, dimana wewenang pengangkatan dan pemberhentian Direksi di tangan RUPS. Sehingga dalam model *two-board system* di Indonesia kedudukan dewan direksi sejajar dengan kedudukan dewan komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perseroan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

**Gambar 2.4**  
**Dual-board sistem yang berlaku di Indonesia**



Sumber : FCGI (2002)

Menurut Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi pertimbangan-pertimbangan kepada direksi.

#### **2.1.2.4 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

Dengan melaksanakan *corporate governance*, manfaat yang bisa dipetik antara lain (FCGI, 2008):

1. Meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*,
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah karena faktor kepercayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan deviden.

Manfaat yang lain bagi perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* menurut Djatmiko (2004) dalam Sandi (2006), kepercayaan investor,

mitra bisnis ataupun kreditur menjadi lebih lincah karena pembagian tugas serta kewenangan yang jelas, Dan perimbangan kekuatan di antara struktur internal perusahaan, yakni direksi, komisaris, komite audit, dan sebagainya. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi lebih akuntabel dan lebih berhati-hati demi *sustainability* perusahaan.

Sedangkan tujuan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

#### **2.1.2.5 Implementasi *Good Corporate Governance***

Konsep *good corporate governance* dengan cepat dapat diterima oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Bahkan, bagus tidaknya kinerja saham suatu perusahaan kini ikut ditentukan sejauh mana keseriusannya menerapkan *good corporate governance*. *Survey Credit Lyonnais SA (CLSA)*, Menemukan korelasi positif antara harga saham dan praktik *good corporate governance*. Selama tiga tahun terakhir, nilai saham 100 perusahaan di pasar yang sedang berkembang (*emerging market*) meningkat rata-rata 127% (dalam US\$). Dan, 25

perusahaan peringkat teratas yang mempraktikkan *good corporate governance* dengan sangat baik, nilai sahamnya meroket rata-rata 267%.Sebaliknya, perusahaan yang tak peduli atau asal-asalan dalam menerapkan *good corporate governance* seperti di Indonesia, Filipina dan Pakistan, indeks sahamnya berantakan semua (Djarmko, 2001) dalam Nugraha (2009).

Merujuk pada hasil survey *Good Corporate Governance* 2002 dari *Credit Lyonnais SA (CLSA)*, sebuah perusahaan jasa keuangan global yang bermarkas di Paris, memberikan penilaian bahwa implementasi *good corporate governance* di Indonesia mengalami penurunan. Posisi Indonesia jelas tidak berada dalam posisi 20 besar dunia, dibawah posisi Singapura dan Malaysia di Asia Tenggara (Daniri (2004) dalam Nugraha (2009). Sebagai catatan, tahun 2001 CLSA mengeluarkan hasil survei yang sama dan Indonesia mendapatkan skor 3,1. Hal ini jauh berada apabila dibandingkan dengan Malaysia yang mengalami peningkatan yang signifikan dari 3,7 (2001) dan 4,7 (2002).

McKinsey & Company dalam penelitiannya memberi indikasi bahwa para manajer dana di Asia akan membayar 26-30% lebih untuk saham-saham perusahaan dengan *corporate governance* yang baik ketimbang untuk saham-saham perusahaan dengan *corporate governance* yang meragukan. Semua ini berarti bahwa Negara-negara dan perusahaan-perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik akan mempunyai akses yang lebih baik terhadap sumber dana internasional dibandingkan mereka yang tidak mempunyai *corporate governance* yang baik (FCGI, 2008).

Daniri (2004) dalam Nugraha (2009) mengambil kesimpulan bahwa pertama, untuk mempercepat implementasi *good corporate governance* diperlukan perubahan paradigma dari hanya sekedar pemenuhan peraturan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Kedua, implementasi *good corporate governance* merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak terkecuali pemerintah. Ketiga, implementasi *good corporate governance* dan *good public governance* harus dilaksanakan secara paralel.

#### **2.1.2.6 Implementasi Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* dalam Industri Perbankan**

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Oleh karena itu industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya agar kegiatan operasinya berjalan sesuai dengan tujuan industri perbankan tersebut. Dan prinsip yang paling cocok diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip *Corporate Governance* (Surya dan Yustiavandana (2006) dalam Hardikasari (2011).

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* juga disarankan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal

perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan adanya penerapan *Corporate governance* dalam industri perbankan. Penerapan *corporate governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank sendiri, juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *corporate governance* menjadi suatu kepercayaan mengingat industri perbankan mengelola dana publik (nasabah).

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Corporate Governance* antara lain peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperoleh atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah berbagai upaya perwujudan *Corporate Governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh dewan Direksi dan atau Komisaris maupun pemegang saham.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *Corporate Governance* adalah peraturan Bank Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut.

### 2.1.2.7 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme adalah suatu aturan, prosedur dan cara kerja yang harus ditempuh untuk mencapai kondisi tertentu, mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu mekanisme berdasarkan pada aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang ada dalam suatu perusahaan untuk menjalankan peran dan tugasnya. Mekanisme *Corporate Governance*, terdiri dari tiga elemen penting, yaitu struktur, sistem dan proses yang digunakan oleh organ-organ dalam suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Struktur mempunyai peran yang sangat fundamental dalam implementasi mekanisme *Corporate Governance*, struktur merupakan kerangka dasar tempat diletakkannya sistem dalam penyusunan mekanisme *Corporate Governance* perusahaan. Struktur *Corporate Governance* berperan sebagai kerangka dasar manajemen perusahaan yang menjadi dasar pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab diantara organ-organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan RUPS / pemegang saham) dan *Stakeholder* lainnya, serta aturan-aturan maupun prosedur pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.

Struktur *Corporate Governance* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur pengendalian internal dan struktur pengendalian eksternal. Struktur pengendalian eksternal terdiri dari pihak-pihak berkepentingan yang berasal dari luar perusahaan seperti pasar modal, pasar uang, regulator dan profesi lainnya (paralegal, auditor dan lain sebagainya). Penelitian ini berfokus pada struktur



pengendalian internal perusahaan yang terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi.

#### **2.1.2.7.1 Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan salah satu fungsi kontrol yang terdapat dalam suatu perusahaan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris merupakan salah satu bentuk praktis dari teori agensi. Di dalam suatu perusahaan, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk melaksanakan fungsi pengawasan dari principal dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Dewan komisaris menjembatani kepentingan principal dan manajer di dalam perusahaan.

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan member masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Sementara *Forum for Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta kewajiban terlaksananya akuntabilitas. Secara umum dewan komisaris merupakan wakil pemilik kepentingan (*shareholder*) dalam perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola

dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat 5 dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 anggota dewan komisaris. Karena itu jumlah anggota komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Menurut Sembiring (2003), semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, makin mudah untuk mengendalikan CEO dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen. Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Hardikasari, 2011).

Dalam FCGI (2002), keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2002. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar yang terdaftar di bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional disini adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal dewan komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau komisaris lainnya perusahaan yang tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya terafiliasi perusahaan yang tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (*non-controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

#### **2.1.2.7.2 Dewan Direksi**

Dewan direksi yaitu dewan yang dipilih oleh pemegang saham, bertugas mengawasi pekerjaan yang dilakukan manajemen dalam mengelola perusahaan, dengan tujuan kepentingan para pemegang saham (Iqbal, 2007). Dewan direksi pada perusahaan bertindak sebagai agen dalam perusahaan. direksi menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan juga berdasarkan atas kewenangan yang diterima dari pemilik perusahaan. Dewan ini juga bertanggung jawab langsung terhadap jalannya kegiatan operasional perusahaan (Dody dan Hapsoro, 2006).

Ukuran dewan direksi dalam perusahaan sangatlah penting untuk pencapaian komunikasi yang efektif antar anggota dewan. komunikasi yang baik

akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam perusahaan sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Pedoman GCG yang dihasilkan oleh KNKG merumuskan prinsip-prinsip penting dalam Dewan Direksi yang menjadi acuan dalam usaha bisnis di Indonesia (Emirzon, 2007). Terutama dalam hal komposisi dewan direksi yaitu komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat, dan cepat sehingga dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. Tergantung dari sifat khusus suatu perseroan, setidaknya paling sedikit 20% dari jumlah direksi yang harus berasal dari kalangan di luar perseroan guna meningkatkan efektifitas atas peran manajemen, dan transparan dari pertimbangannya.

### **2.1.3 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan, karena ukuran perusahaan menjadi tolok ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan adalah total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, *value added*, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya.

Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan *corporate governance* yang lebih baik (Retno dan Priantinah, 2012). Ukuran perusahaan

yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset yang besar dan perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam laporan keuangannya. Untuk menghindari kecurangan dan manipulasi dalam laporan keuangan tersebut, maka diperlukan sistem *corporate governance* yang kondusif.

Perusahaan dengan aset yang besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Dengan adanya kemudahan mengakses pasar modal, perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana (Puspitasari dan Ernawati, 2010). Ukuran perusahaan yang besar cenderung membagikan deviden untuk menghindari konflik keagenan antara pihak manajer dan pemilik (Mengginson, 1997) perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Wiesantana, 2008).

#### **2.1.4 Kinerja Keuangan Perbankan**

Kinerja keuangan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur kesehatan (*financial health*) perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektifitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Kinerja keuangan yang maksimal dapat diperoleh dengan adanya fungsi

yang benar dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, *corporate governance* berperan penting dalam optimalisasi kinerja keuangan.

Menurut Febryai dan Zulfadin (2003), kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun. Karena kinerja perusahaan adalah cerminan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai target organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan hasil yang diharapkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana yang dituangkan dalam anggaran.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi *shareholders* dan perusahaan, termasuk perusahaan disektor perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Booklet Perbankan Indonesia (2012) dinyatakan bahwa bank memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai: (1) penunjang kelancaran sistem pembayaran, (2) pelaksanaan kebijakan moneter, dan (3) pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik.

Kinerja bank dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Desfian,2005).

Penilaian kinerja bank menjadi sangat penting dilakukan karena posisi perbankan yang vital di dalam stabilitas perekonomian nasional. Perbankan memainkan peran penting dalam mobilisasi dana, alokasi kredit, sistem pembayaran dan implementasi kebijakan moneter (Mohammed dan Fatimah, 2012). Selain itu, penilaian kinerja bank juga sangat diperlukan oleh setiap *stakeholders* bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen, prospek usahanya dapat terus berkembang, serta dapat memenuhi *prudential banking regulation* dengan baik, tentu akan mendapat kepercayaan penuh dari publik.

Kinerja bank yang baik dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank tersebut atau dapat dikatakan kedua hal itu saling berkaitan. Ukuran untuk melakukan penilaian kinerja keuangan telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 19 maret 1998 tentang Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan *corporate governance* di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) terhadap calon dewan komisaris, dewan direksi dan pemegang saham pengendali, karena pihak-pihak

tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank (Bank Indonesia, 2011).

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan (Purwantini, 2008). Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan kinerja manajemen bank selama satu periode. Dari laporan ini, akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya. Termasuk keemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan perbankan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak (kasmir, 2000). Keadaan yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh para manajer untuk melakukan tindakan manipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk meminimalisasi manipulasi data tersebut, maka cara tepat yang digunakan adalah dengan praktik *corporate governance*.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996), Menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Data historis laporan keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Tujuan pelaporan adalah memberikan informasi yang berguna dalam keputusan-keputusan investasi dan kredit, menilai arus kas mendatang dan informasi mengenai sumber daya dalam perusahaan.



Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang utama adalah (1) Neraca, (2) Laporan Laba Rugi, (3) Laporan ekuitas pemilik, dan (4) Laporan arus kas. Penelitian ini menggunakan indikator laporan arus kas (*cash flow*) untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perbankan.

Laporan arus kas menggambarkan jumlah penerimaan kas dan jumlah pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Aktivitas usaha akan menghasilkan arus kas masuk bersih (bila penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas). Serta arus kas keluar bersih (bila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas). Laporan arus kas menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode.

*Cash Flow Return On Asset* (CFROA) adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. CFROA di hitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva (Sam'ani, 2008). Arus kas (*cash flow*) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan dimasa mendatang (Kieso dan Weygandt, 1995)

Cornett *et al.*, (2006) menyatakan bahwa penggunaan CFROA dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki berbagai keunggulan sebagai berikut: (1) CFROA menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba operasi, (2) CFROA lebih memfokuskan kepada pengukuran

kinerja keuangan perusahaan saat ini dan tidak terikat dengan saham, dan (3) adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* dan berhubungan positif dengan CFROA.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang penerapan *Corporate Governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bauer, (2003) melakukan penelitian terhadap penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap *firm valuation* yang diproxy dengan Tobin's Q dan kinerja perusahaan yang diproxy dengan ROE dan NPM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam FTSE Eurotop 300 selama periode 2000-2001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q, ROE dan NPM.
2. Darmawati (2004) meneliti hubungan antara *Corporate Governance* dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survey IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG di dalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proxy variabel *Corporate Governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi oleh kinerja keuangan (*Return*

on Equity/ ROE) dan nilai perusahaan (*Tobins'Q*). hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Corporate Governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi *Tobin'Q*.

3. Sanda et al (2005)

Sanda *et al* meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan di perusahaan Nigeria. Variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan variabel dummy CEO ekspatriat. Variabel dependennya, yaitu ROA, ROE, dan Tobin's Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobins'Q. CEO ekspatriat berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan *Leverage* dan Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE dan Tobin's Q. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tercatat di Nigerian Stock Exchange periode 1996-1999.

4. Putri (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan jumlah komisaris terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2004-2005. Hasil analisis model regresi dengan Tobin's Q sebagai variabel dependennya menunjukkan bahwa baik variabel *corporate governance* maupun variabel kontrol mempengaruhi kinerja perusahaan.

5. Yudha Pranata (2007) meneliti pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Corporate Governance* terhadap ROE, NPM, dan Tobin's Q. Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan yang diambil secara *purpose sampling* yaitu perusahaan yang telah go public yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan skor pemeringkatan *Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap ROE, NPM, dan Tobin's Q dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan *Corporate Governance* disebabkan oleh faktor lain yang tidak ditetapkan dalam model regresi.
6. Sam'ani (2008) meneliti *Good Corporate Governance* yang variabel independennya terdiri dari kepemilikan institusional, aktivitas dewan komisaris, aktivitas dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, dan leverage. Sedangkan variabel dependennya, yaitu kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan CFROA. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional dan *leverage* mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen secara signifikan tidak

dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dengan total sampel 28 perusahaan selama periode 2004-2007.

7. Che Haat et al (2008), Merumuskan tentang hubungan antara penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. menggunakan variabel *timelines* (ketepatanwaktuan) dan *disclosure* (pengungkapan) hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara penerapan *good corporate governance* dengan *timelines* dan *disclosure*. Selain itu penelitian ini menemukan pula bahwa *timelines* dan *disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun, penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan *good corporate governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	Bauer	2003	<i>Corporate Governance</i> , Tobin's Q, ROE, dan NPM	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q, ROE dan NPM
2	Darmawati	2004	Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, <i>board size</i> , NPM	Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap NPM; Jumlah komisaris independen, <i>board size</i> berpengaruh positif dan signifikan

				terhadap NPM. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
3	Sanda <i>et all</i>	2005	Ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, komisaris independen	1. ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerjanya 2. ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja. 3. komisaris independen
4	Putri	2006	<i>Corporate Governanace</i> , dewan komisaris, dan Tobin's Q	<i>Corporate Governanace</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
5	Yudha Pranata	2007	<i>Corporate Governance</i> , ROE, NPM dan <i>Tobin's Q</i>	Penerapan <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap ROE, NPM dan <i>Tobin's Q</i> .
6	Sam'ani	2008	Ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, komisaris independen, CFROA	1. ukuran dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 2. kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 3. komisaris independen

				berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
7	Che Haat <i>et al</i>	2008	Ukuran perusahaan, Timelines dan Disclosure.	Variabel mekanisme internal <i>corporate governance</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan

## 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis, Perumusan Masalah dan Hipotesis

### 2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan

Dewan Komisaris dalam pernyataan KNKG (2006) Merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan praktik *corporate governance*. Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam mengelola perusahaan. Khususnya

dalam memonitor manajemen puncak. Perusahaan yang mempunyai persentase dewan komisaris eksternal lebih rendah akan mempunyai pengawasan yang rendah terhadap kinerja perusahaan (Astuti dan Zahrotun, 2007). Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan

direksi dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan (Wardhani, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Hardikasari (2011) menyebutkan bahwa penelitian mengenai ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Dalam penelitian tersebut, disebutkan argumen dari yermack (1996), Sundgren dan Wells (1998), dan Jensen (1993), yang menyatakan bahwa semakin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan makin banyaknya anggota dewan komiaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam menjalankan komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris.

Dengan semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik. Untuk itu masih diperlukan penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

$H_1$  : *Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.*

### **2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan**

Dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik. dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi



sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan? Apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bughsan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Yenmack, 1996).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih sedikit (Jensen, 1993; Lipton dan Lorsch, 1992; Yenmack, 1996). Delton et al.,(1999) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara ukuran dengan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al.,(1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel di Finlandia. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *Corporate Governance*, dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan. Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

$H_2$  : *Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan*

### **2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan**

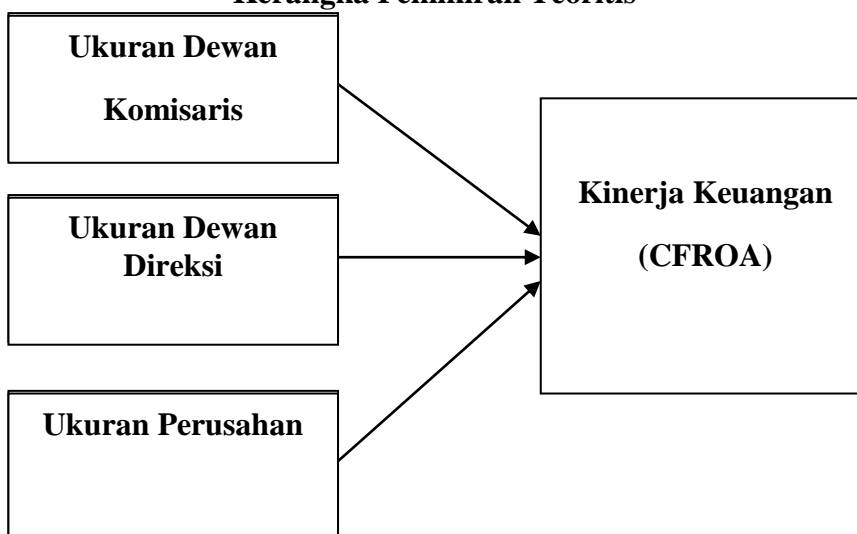
Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dalam hal ini diukur dengan melihat seberapa besar

aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Aset yang dimiliki perusahaan ini menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan perusahaan.

Ukuran perusahaan akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. (Darmawati, 2004) menyatakan bahwa perusahaan besar pada dasarnya memiliki kekuatan finansial yang lebih besar dalam menunjang kinerja. Tetapi di sisi lain, perusahaan dihadapkan pada masalah keagenan yang lebih besar. Hesti (2010) dan Uyun (2010) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya. Perusahaan diharapkan akan selalu berusaha menjaga stabilitas kinerja keuangan mereka. Pelaporan kondisi keuangan yang baik ini tentu tidak serta merta dapat dilakukan tanpa melalui kinerja yang baik dari semua lini perusahaan.

*H<sub>3</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.*

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perbankan yang dihitung dengan *Cash Flow Return On Assets* (CFROA). Variabel independennya adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran perusahaan.

##### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Flow Return On Assets* (CFROA). CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva (Sam'ani 2008).

Berikut rumus CFROA:

$$\text{Cash Flow Return On Assets (CFROA)}: \frac{EBIT + Dep}{Assets} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

- EBIT           = Laba sebelum bunga dan pajak
- Dep           = Depresiasi
- Assets        = Total Aktiva

### 3.1.2 Variabel Independen

#### 3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang memberikan pengarahan kepada manajemen dan mengawasi tindakan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan (Darwis, 2009).

Berikut rumus Ukuran Dewan Komisaris:

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \sum \text{anggota dewan komisaris} \dots \dots \dots (3.1)$$

#### 3.1.2.2 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi mempunyai peran yang berfungsi sebagai organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengamatan keputusan. Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada di dalam perusahaan (Suranta dan Machfoedz, 2003).

Berikut rumus Ukuran Dewan Direksi:

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = \sum anggota\ dewan\ komisaris \dots \dots \dots (3.2)$$

### 3.1.2.3 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar kecilnya suatu perusahaan. Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) diukur dengan menggunakan logaritma natural (*Ln*) dari total aset (Susanti, 2011). Hal ini dikarenakan besar total aset masing-masing perusahaan berbeda, bahkan dapat memiliki selisih yang besar.

Berikut rumus Ukuran Perusahaan (*SIZE*):

$$SIZE = Ln\ Total\ Aset \dots \dots \dots (3.3)$$

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel	DEFINISI	SKALA	RUMUS
<i>Cash Flow Return On Assets</i>	Rasio yang mengukur kinerja keuangan perusahaan yang dihitung dengan laba sebelum bunga dan pajak ditambah dengan depresiasi lalu dibagi dengan total aktiva.	Rasio	$\frac{EBIT + Dep}{Assets}$
<b>Ukuran Dewan Komisaris</b>	Jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal.	Rasio	$\sum$ Anggota dewan komisaris
<b>Ukuran Dewan Direksi</b>	Jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan.	Rasio	$\sum$ Anggota dewan direksi
<b>Ukuran Perusahaan</b>	Ukuran atau besaran total aset yang dimiliki oleh perusahaan.	Interval	Size = Ln Total Aset

### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2012. Dipilih sektor perbankan dikarenakan sektor ini masih sangat diminati oleh kalangan investor lokal maupun asing, sehingga perkembangannya akan tetap terus dipantau. Ditambah dengan prospek ekspansi perbankan di Indonesia masih sangat luas.

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik non random sampling, yaitu dengan cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. Salah satu teknik pengambilan sampling yang termasuk dalam teknik *non random sampling* adalah *metode purposive sampling*. Metode purposive sampling adalah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti dimana syarat yang harus dipenuhi oleh sampel. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.
2. Perusahaan perbankan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara lengkap periode 2010-2012 dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan memiliki informasi lengkap mengenai dewan komisaris, dewan direksi dan ukuran perusahaan.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan merupakan data laporan perusahaan perbankan tahun 2010-2012. Data diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), annual report yang didapat melalui pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan dari website *www.idx.co.id*.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, studi pustaka dari berbagai literatur, serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD), *annual report* yang didapat melalui Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan dari website *www.idx.co.id*

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis. Analisis regresi berganda ini selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2006).



Seperti yang telah dipaparkan diatas, variabel independen dalam penelitian ini antara lain : Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Ukuran Perusahaan. Dengan variabel dependen yang digunakan yaitu : *Cash Flow Return On Asset*.

Berdasarkan variabel independen dan dependen tersebut, maka dapat disusun persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

$$Y = a + b_1DKOM + b_2DDIR + b_3LNaset + e$$

Keterangan :

Y = *Cash Flow Return On Asset* (CFROA)

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

DKOM = Dewan Komisaris

DDIR = Dewan Direksi

LNaset = Ukuran Perusahaan

e = Standard eror

### 3.5.1 Analisis statistik deskriptif

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Gambaran yang diberikan dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah metode numerik yang berfungsi untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang terdapat dalam data, dan menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang diinginkan (Ghozali, 2006).

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang telah dikumpulkan akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar. Pengujian tersebut antara lain.

#### 1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung nilai *variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap variabel independen.(Ghozali, 2006). Dasar analisisnya adalah:

- a. Jika nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai *tolerance* < 10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

## 2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan suatu alat analisis dalam uji penyimpangan asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensi dari adanya autokorelasi dari suatu model regresi adalah varian populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel tidak bebas tertentu. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan *Run Test*. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

$H_0$  : residual (res\_1) random

$H_A$  : residual (Res\_1) tidak random

Apabila hasil menunjukkan probabilitas lebih dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

UJI Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji, digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat adanya

pola tertentu pada grafik skatter plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang di prediksi dan sumbu X adalah residual ( $Y$  prediksi –  $Y$  sesungguhnya) yang telah di *studentied*. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan Uji Park, Uji Glejser, dan Uji White.

#### 4. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam Uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2005).

### 3.5.3 Uji Goodness of Fit

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara Statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik F, nilai koefisien determinasi nilai statistik t (Ghozali, 2006).

#### 3.5.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama

terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006). Cara melakukan uji F adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat signifikansi) yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian (probabilitas) yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output. Untuk mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (H<sub>0</sub>):
  - a. Apabila signifikansi > 0.05 maka keputusannya adalah menerima H<sub>0</sub> dan menolak H<sub>a</sub>.
  - b. Apabila signifikansi < 0.05 maka keputusannya adalah menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>a</sub>.
2. Membandingkan nilai statistik F hitung dengan nilai statistik F tabel:
  - a. Apabila nilai statistik F hitung < nilai statistik F tabel, maka H<sub>0</sub> diterima.
  - b. Apabila nilai statistik F hitung > nilai statistik F tabel, maka H<sub>0</sub> ditolak.

Rumus uji F adalah (Priyatno, 2008):

$$F = \frac{R^2 \times K}{(1-R^2)/(n-1-K)}$$

R<sup>2</sup> = Koefisien korelasi berganda dikuadratkan

N = jumlah sampel

K = jumlah variabel bebas.

### 3.5.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut.

- a. *Quick Lock*: bila jumlah *degree off freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan drajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i=0$  dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

### 3.5.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0-1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan-kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk

data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Pada uji ini digunakan nilai Adjusted  $R^2$ , dimana nilai Adjusted  $R^2$  dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Jika dalam uji empiris didapat nilai Adjusted  $R^2$  negatif. Maka nilai Adjusted  $R^2$  dianggap bernilai 0. Secara matematis jika nilai  $R^2 = 0$ , maka Adjusted  $R^2 = R^2 = 0$  sedangkan jika nilai  $R^2 = 1$ , maka Adjusted  $R^2 = (1 - k)/(n - k)$ . jika  $R^2 > 1$ , maka Adjusted  $R^2$  akan bernilai negatif.